

Katalog BPS: 4601004.14

PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU 2018



<https://riau.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau**

PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU 2018

<https://riau.bps.go.id>



Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2018

ISSN : 2657-0874

No. Publikasi : 14520.1907

Katalog BPS : 4601004.14

Ukuran Buku : 17,6 Cm x 25 Cm

Jumlah Halaman : xvi + 52 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Riau

Penyunting :

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Riau

Desain Kover oleh :

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Riau

Penerbit :

©BPS Provinsi Riau

Pencetak :

CV. MN Grafika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Organisasi Penulisan

Pengarah :

Drs. Misfaruddin, M.Si

Editor :

Ahmad Azhari, S.Si

Emilia Dharmayanthi, SST, M.Si

Penulis :

Dwijotulus Saputro, SE

Yuhestia Rosalin, SST

Setting :

Dwijotulus Saputro, SE

<https://riau.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2018 ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau berisi berbagai data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Provinsi Riau, dan merupakan publikasi rutin setiap tahun.

Materi yang disajikan dalam Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2018 ini, terutama didasarkan atas hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang memuat berbagai informasi mengenai indikator-indikator demokrasi yang digunakan sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas di Provinsi Riau. IDI memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi pada tingkat provinsi. Melalui IDI, keadaan demokrasi di Provinsi Riau relatif dapat digambarkan dengan lebih jelas. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan, terutama di bidang politik.

Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Pekanbaru, November 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau


Drs. Misfaruddin, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Organisasi Penulisan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Grafik	xii
Ringkasan Eksekutif	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Perkembangan Demokrasi Global	3
1.2 Urgensi Demokrasi di Indonesia	3
1.2.1 Apa Itu IDI?	4
1.2.2 Mengapa IDI Diperlukan?	5
1.3 Konsep dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia	6
1.3.1 Kerangka Konseptual IDI	6
1.3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil (<i>Civil Liberties</i>)	7
1.3.1.2 Aspek Hak-Hak Politik (<i>Political Rights</i>)	8
1.3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi (<i>Institutions of Democracy</i>)	8

1.3.2	Metodologi IDI	10
1.3.2.1	Review Media dan Dokumen	11
1.3.2.2	<i>Focused Group Discussion</i> (FGD)	12
1.3.2.3	<i>Indepth Interview</i>	12
1.3.3	Skala Kinerja Demokrasi	13
BAB II	PROFIL IDI RIAU TAHUN 2017-2018	21
2.1	Dinamika IDI Provinsi Riau Tahun 2018	21
2.2	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	24
2.2.1	Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	26
2.2.2	Variabel Kebebasan Berpendapat.....	28
2.2.3	Variabel Kebebasan Berkeyakinan	29
2.2.4	Variabel Kebebasan dari Diskriminasi	30
2.3	Indeks Aspek Hak-Hak Politik	31
2.3.1	Variabel Hak Memilih dan Dipilih	33
2.3.2	Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	36
2.4	Indeks Aspek Lembaga Demokrasi	37
2.4.1	Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil	39
2.4.2	Variabel Peran DPRD	40

2.4.3	Variabel Peran Partai Politik	41
2.4.4	Variabel Peran Birokrasi Pemerintah	42
2.4.5	Variabel Peran Peradilan yang Independen	43
BAB III KESIMPULAN		47
DAFTAR PUSTAKA		51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1 Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil.....	26
Tabel 2.2.2 Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	27
Tabel 2.2.3 Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berpendapat.....	29
Tabel 2.2.4 Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkeyakinan.....	30
Tabel 2.2.5 Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan dari Diskriminasi	31
Tabel 2.3.1 Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik	32
Tabel 2.3.2 Nilai Indeks Masing-masing Variabel Hak Memilih dan Dipilih	33
Tabel 2.3.3 Nilai Indeks Masing-masing Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	36
Tabel 2.4.1 Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi	38
Tabel 2.4.2 Nilai Indeks Masing-masing Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil.....	40
Tabel 2.4.3 Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran DPRD	41
Tabel 2.4.4 Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Partai Politik ..	41

Tabel 2.4.5 Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Birokrasi Pemerintah.....	42
Tabel 2.4.6 Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Peradilan yang Independen	43

<https://riau.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau, 2010–2018.....	20
Grafik 2.1.2 Sebaran Nilai Capaian Aspek IDI Provinsi Riau, 2009–2018.....	23
Grafik 2.3.1 Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel Hak Memilih dan Dipilih yang terkait Pemilihan Umum, tahun 2009 dan 2014.....	35
Grafik 2.4.1 Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil yang terkait Pemilihan Umum, tahun 2009 dan 2014.....	39

Ringkasan Eksekutif

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau 2018 mencapai angka 77,59 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 73,41. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Riau masih berada pada kategori “sedang”. Nilai IDI tersebut merupakan nilai tertinggi yang dicapai oleh Provinsi Riau sejak Tahun 2009.

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau dari tahun 2017 ke tahun 2018 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni Aspek Kebebasan Sipil dimana pada aspek tersebut nilai indeks mengalami peningkatan 4,85 poin (dari 82,03 menjadi 86,88), Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi meningkat 16,06 poin (dari 73,41 menjadi 89,47), sedangkan pada Aspek Hak-Hak Politik mengalami penurunan 3,80 poin (dari 66,57 menjadi 62,77). Pada tahun 2018 terdapat enam variabel IDI yang mengalami kenaikan indeks, tiga variabel yang mengalami penurunan dan dua variabel tidak mengalami perubahan. Dari enam variabel yang mengalami kenaikan, satu di antaranya mengalami kenaikan paling tinggi, yaitu Variabel Peran Peradilan yang Independen.

Variabel Peran Peradilan yang Independen mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 50,00 poin, dari 50,00 pada 2017 menjadi 100,00 pada 2018 berubah dari kategori “buruk” menjadi kategori “baik”. Hal ini disebabkan tidak adanya keputusan hakim yang kontroversial dan penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi di Provinsi Riau sepanjang tahun 2018.

Kenaikan kedua tertinggi terjadi pada Variabel Peran Kebebasan dari Diskriminasi yaitu sebesar 14,79 poin, dari 78,68 pada 2017 menjadi 93,47

pada 2018. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender dan tindakan maupun ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya di Provinsi Riau sepanjang tahun 2018.

Kenaikan variabel tertinggi ketiga sebesar 11,80 poin terjadi pada Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 70,50 pada tahun 2018 dibandingkan. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan kenaikan nilai cukup tajam sebesar 41,67 poin.

Di sisi lain, Variabel Kebebasan Berpendapat mengalami penurunan sebesar 10,44 poin, dari 93,74 pada 2017 menjadi 83,30 pada 2018 namun demikian, nilai Variabel Kebebasan Berpendapat masih pada kategori "baik". Penurunan ini disebabkan selama tahun 2018 kejadian yang menghambat kebebasan berpendapat oleh masyarakat terhadap masyarakat lainnya di Provinsi Riau terjadi peningkatan. Variabel lain yang menunjukkan penurunan adalah Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Nilai variabel ini turun sebesar 7,61 poin, dari 57,61 tahun 2017 menjadi 50,00 tahun 2018 dan masih pada kategori "buruk".



PENDAHULUAN

<https://riau.bps.go.id>

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia

KOMPONEN IDI TERDIRI ATAS 3 ASPEK, 11 VARIABEL DAN 28 INDIKATOR

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
Kebebasan Sipil 	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
Hak-Hak Politik 	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
Lembaga Demokrasi 	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator



SKALA KINERJA DEMOKRASI (0-100)

- Kinerja demokrasi “Baik” (Indeks > 80)
- Kinerja demokrasi “Sedang” (Indeks 60 – 80)
- Kinerja demokrasi “Buruk” (Indeks < 60)

1 PENDAHULUAN

1.1 Perkembangan Demokrasi Global

Akhir-akhir ini masyarakat dunia menjadi saksi dua fenomena menarik terkait dengan perkembangan demokrasi global. Pertama, terjadinya gelombang besar demokratisasi yang melanda sejumlah negara yang sebelumnya dikenal tidak bersahabat atau bahkan resisten terhadap ide-ide demokrasi, misalnya negara-negara di kawasan Timur Tengah. Fenomena yang sering disebut sebagai *The Arab Spring* ini telah menurunkan rezim-rezim otoriter di Tunisia, Mesir, dan Libya. Gelombang ini merefleksikan kecenderungan global yang kuat untuk menerima demokrasi sebagai pilihan sistem politik dan pemerintahan yang sah.

Kedua, pada kurun waktu yang sama, banyak negara yang telah melalui proses demokratisasi pada gelombang sebelumnya justru mengalami kemerosotan kualitas demokrasi. Kecenderungan kedua ini membawa sejumlah ahli pada kesimpulan bahwa sedang terjadi resesi demokrasi (*democratic recession*) atau penurunan kualitas demokrasi (*democratic decline*). Penurunan kualitas demokrasi ini merupakan konsekuensi dari lambatnya konsolidasi.

1.2 Urgensi Indeks Demokrasi di Indonesia

Dalam dua dasawarsa terakhir, pengukuran demokrasi menjadi topik hangat di kalangan akademik serta pemerhati dan praktisi pembangunan. Gelombang demokratisasi global telah menjadikan separuh penduduk dunia

kini hidup dalam sistem demokrasi, dengan berbagai variasi pada tataran praktiknya. Oleh karena itu muncul kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana demokratisasi telah berjalan serta melakukan perbandingan antar-negara.

Indonesia, yang menjalani transisi demokrasi besar-besaran, sering disebut sebagai *big bang transition*; juga merasakan kebutuhan ini. Bahkan, dengan variasi antar-daerah yang sangat lebar, kebutuhan ini menjadi sangat terasa. Indonesia perlu mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di tingkat daerah karena keberhasilannya sebagai negara demokratik akan sangat tergantung pada sejauh mana demokrasi berkembang dan diterapkan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

1.2.1 Apa Itu IDI?

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*, yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia.

Empat prinsip dasar penyusunan IDI antara lain:

1. IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi.
2. IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi.
3. IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat.
4. IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas.

1.2.2 Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah berakhirnya Orde Baru yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi penyelenggaraan negara. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya, karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lain yang lebih tepat untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter.

Sekarang, setelah dua puluh satu tahun berjalan sejak Reformasi, muncul pertanyaan sejauh mana sesungguhnya perkembangan demokrasi ini, khususnya pada tingkat provinsi. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif. Keberadaan pengukuran seperti ini juga diharapkan memicu *diskursus* di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

IDI dibuat dengan provinsi sebagai unit analisa. Dengan kata lain, IDI adalah suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya bagaimana kondisi atau status perkembangan demokrasi politik pada tingkat provinsi di Indonesia. Dengan demikian, IDI merupakan potret demokrasi pada tingkat provinsi.

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat. Pertama, secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang

mempelajari perkembangan demokrasi dan proses demokratisasi di Indonesia, seperti para pengambil kebijakan dibidang politik, pendidikan termasuk mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Keberadaan IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Kedua, bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi. Data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses *deliberasi* perumusan kebijakan dan program pembangunan politik atau proses demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.

1.3 Konsep dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia

Bab ini akan menyajikan konseptualisasi dan kontekstualisasi demokrasi dalam rangka membangun Indeks Demokrasi Indonesia.

1.3.1 Kerangka Konseptual IDI

Secara sederhana, definisi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ditandai antara lain oleh adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam menyusun IDI disepakati tiga aspek yang dijadikan objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah

Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak Politik (*Political Rights*), dan Kelembagaan Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut tidak mungkin akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah”, struktur, dan prosedur pendukung, maka Kelembagaan Demokrasi juga dianggap sebagai aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, dalam penyusunan IDI kelembagaan demokrasi didudukkan sebagai aspek ketiga.

1.3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

Secara sederhana, kebebasan sipil dapat didefinisikan sebagai kebebasan individu/warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu/warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian, dalam konteks IDI, kebebasan sipil yang akan dilihat dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut:

- 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, (variabel ke - 1)
- 2) Kebebasan Berpendapat, (variabel ke - 2)

- 3) Kebebasan Berkeyakinan, (variabel ke - 3)
- 4) Kebebasan dari Diskriminasi, (variabel ke - 4).

Sementara pada tingkat indikator, terdapat 10 (sepuluh) indikator dalam aspek Kebebasan Sipil ini, yang terdiri dari dua indikator pada variabel pertama dan kedua, serta masing-masing tiga indikator pada variabel ketiga dan keempat.

1.3.1.2 Aspek Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

Political Rights merupakan indikator demokrasi politik yang cukup lengkap, mencakup partisipasi dan kompetisi. Dalam konteks IDI, Hak-Hak Politik diturunkan ke dalam dua variabel yakni:

- 1) Hak Memilih dan Dipilih, (variabel ke - 5)
- 2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, (variabel ke - 6).

Sementara pada tingkat indikator, aspek Hak-Hak Politik memiliki tujuh indikator yang terdiri dari lima indikator pada variabel kelima, dan 2 indikator pada variabel keenam.

1.3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin dapat teraktualisasi secara maksimal tanpa didukung oleh lembaga demokrasi. Atas dasar pertimbangan ini, cukup beralasan bila

beberapa akademisi telah mengartikulasi lembaga demokrasi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari kebebasan sipil dan hak-hak politik.

Mengingat begitu krusialnya peran dari lembaga demokrasi tersebut, maka bagi mereka yang berafiliasi dengan perspektif ini acapkali mengatakan bahwa satu di antara yang membedakan antara demokrasi dan anarki adalah karena kebebasan sipil dalam praktik demokrasi dilakukan secara institusional, atau dengan kata lain didasarkan pada aturan, norma, prosedur dan kelembagaan yang telah disepakati secara bersama.

Pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara. Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis.

Dengan merujuk sejumlah elemen dari institusi demokrasi, untuk tujuan pengukuran IDI, aspek Lembaga Demokrasi pun telah dioperasionalkan ke dalam sejumlah variabel berikut:

- 1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil, (variabel ke - 7)
- 2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (variabel ke - 8)
- 3) Peran Partai Politik, (variabel ke - 9)
- 4) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, (variabel ke - 10)
- 5) Peran Peradilan yang Independen, (variabel ke - 11).

Pada tingkat indikator, aspek Lembaga Demokrasi diturunkan ke dalam sebelas indikator, dengan rincian dua indikator pada variabel ketujuh,

kesembilan, sepuluh, dan sebelas, serta tiga indikator pada variabel kedelapan.

Dengan demikian, secara keseluruhan, komponen yang membentuk IDI 2017 terdiri atas 3 Aspek, 11 Variabel, dan 28 Indikator. Informasi lebih rinci tentang indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3.

1.3.2 Metodologi IDI

Pada tingkat yang paling kongkrit, IDI melalui indikator-indikator dari ketiga aspek penting demokrasi, menilai apakah ada aturan, situasi atau kejadian yang mencerminkan ada atau tidak adanya, berkembang atau terhambatnya demokrasi di suatu provinsi. Kondisi demokrasi di suatu daerah dapat dimanifestasikan dalam berbagai indikator, seperti aturan-aturan yang ada, perilaku masyarakat, dan sebagainya.

Selanjutnya berbagai indikasi keadaan demokrasi ini dapat ditangkap melalui berbagai medium seperti dokumen-dokumen resmi, laporan di media masa (cetak maupun elektronik), serta dalam opini masyarakat yang hidup di tempat itu. Dengan demikian ada berbagai data yang mungkin digunakan untuk menangkap kondisi demokrasi, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif.

Menjawab tantangan metodologis di atas, IDI menggunakan metode Triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Sehubungan dengan itu, ada empat metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

review media/telaah media (analisis isi berita surat kabar), *review document* (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), *Focused Group Discussion* (FGD) atau diskusi terarah terbatas, dan *indepth interview* (wawancara mendalam).

1.3.2.1 Review Media dan Dokumen

Review media dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan satu tahun) berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI.

Surat kabar atau koran diyakini sebagai sumber informasi yang paling relevan dalam merekam kehidupan daerah, termasuk didalamnya denyut demokrasi atau proses demokratisasi, selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari.

Dalam konteks penyusunan IDI, persyaratan yang pertama merujuk pada aspek, variabel, dan indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan media yang dimaksud adalah surat kabar terkemuka di Provinsi Riau. Sementara untuk jenis dokumen, yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD –seperti : peraturan daerah (Perda), surat keputusan gubernur, surat keputusan DPRD serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian dan data pemilih dari KPU.

1.3.2.2 *Focused Group Discussion (FGD)*

Secara umum, tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjangkau data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI adalah **pertama**, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen.

Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. **Ketiga**, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen.

1.3.2.3 *Indepth Interview*

Pada konteks penyusunan IDI, wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui *review* media dan dokumen serta FGD. Karena itu, *indepth interview* bukan merupakan metode utama dalam proses pengumpulan data melainkan sebagai komplementer karena melengkapi ketiga metode lainnya.

Dengan peran seperti ini, *indepth interview* baru dilakukan setelah FGD berlangsung guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD. Kendati *indepth interview* bersifat komplementer terhadap metode pengumpulan data lainnya, namun

memiliki peran yang tidak kalah penting karena berperan sebagai “pos” terakhir dalam pengumpulan data kualitatif.

Keterkaitan empat metode di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dua metode pertama (*review* media dan dokumen) berperan sebagai basis utama dalam pengumpulan data kuantitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya, data kuantitatif melalui *review* media dan dokumen diverifikasi dan dilaborasi dengan data kualitatif yang dikumpulkan melalui dua metode berikutnya (FGD dan *indepth interview*).

1.3.3 Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi di Provinsi Riau, digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Kinerja terendah (nilai indeks = 0) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, kinerja tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi (skor 5).

Selanjutnya untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks antar provinsi yang dihasilkan, skala 0 – 100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu “**baik**” (indeks > 80), “**sedang**” (indeks 60 – 80) dan “**buruk**” (indeks < 60).

Komponen penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan Sipil

Variabel I : Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Indikator 1

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Indikator 2

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Variabel II : Kebebasan Berpendapat

Indikator 3

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

Indikator 4

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Variabel III : Kebebasan Berkeyakinan

Indikator 5

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya.

Indikator 6

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya.

Indikator 7

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.

Variabel IV: Kebebasan dari Diskriminasi

Indikator 8

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Indikator 9

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Indikator 10

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Komponen Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Hak-Hak Politik

Variabel V : Hak Memilih dan Dipilih

Indikator 11

Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat.

Indikator 12

Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih.

Indikator 13

Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Indikator 14

Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*).

Indikator 15

Persentase anggota perempuan DPRD Provinsi terhadap total Anggota DPRD Provinsi.

Variabel VI : Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Indikator 16

Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan.

Indikator 17

Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Komponen Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Lembaga Demokrasi

Variabel VII : Pemilu yang Bebas dan Adil

Indikator 18

Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu.

Indikator 19

Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Variabel VIII : Peran DPRD

Indikator 20

Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap Total APBD.

Indikator 21

Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.

Indikator 22

Rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Variabel IX : Peran Partai Politik

Indikator 23

Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.

Indikator 24

Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.

Variabel X: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

Indikator 25

Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN.

Indikator 26

Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah daerah.

Variabel XI: Peran Peradilan yang Independen

Indikator 27

Keputusan hakim yang kontroversial.

Indikator 28

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.



2

PROFIL IDI RIAU

Tahun 2018

<https://riau.bps.go.id>

PROFIL

Demokrasi Indonesia Provinsi Riau TAHUN 2018



IDI PROVINSI RIAU 2018 : 77,59

ASPEK 2018 :



Kebebasan Sipil

86,88



Hak-Hak Politik

62,77



Lembaga Demokrasi

89,47



2 PROFIL IDI RIAU TAHUN 2018

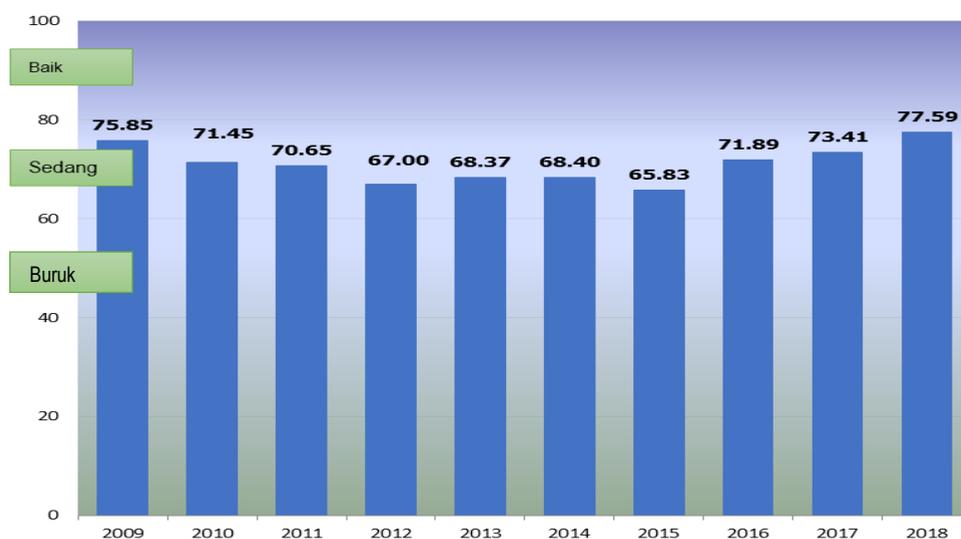
Bab ini menguraikan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau Tahun 2018. Secara berturut-turut akan disampaikan hasil Indeks Provinsi yang merupakan rata-rata capaian Indeks Aspek Kebebasan Sipil, Indeks Aspek Hak-hak Politik dan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi.

2.1 Dinamika IDI Provinsi Riau Tahun 2018

Pada tahun 2018, nilai capaian Indeks Demokrasi Provinsi Riau adalah 77,59. Nilai ini merupakan sumbangan dari ketiga aspek yang diukur yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Dalam skala pengukuran IDI yang berkisar dari 0 sampai dengan 100, nilai indeks Provinsi Riau di atas menunjukkan bahwa kualitas kinerja demokrasi di Provinsi Riau masih tergolong “sedang”. Untuk membandingkan capaian indeks demokrasi Provinsi Riau Tahun 2009-2018, dapat dilihat pada Grafik 2.1.1.

Grafik 2.1.1

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau, 2009-2018



Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau tahun 2018 mencapai 77,59 (dalam skala indeks 0 sampai 100). Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2017 yang capaiannya sebesar 73,41. Meskipun cukup banyak mengalami perubahan, Indeks Demokrasi Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

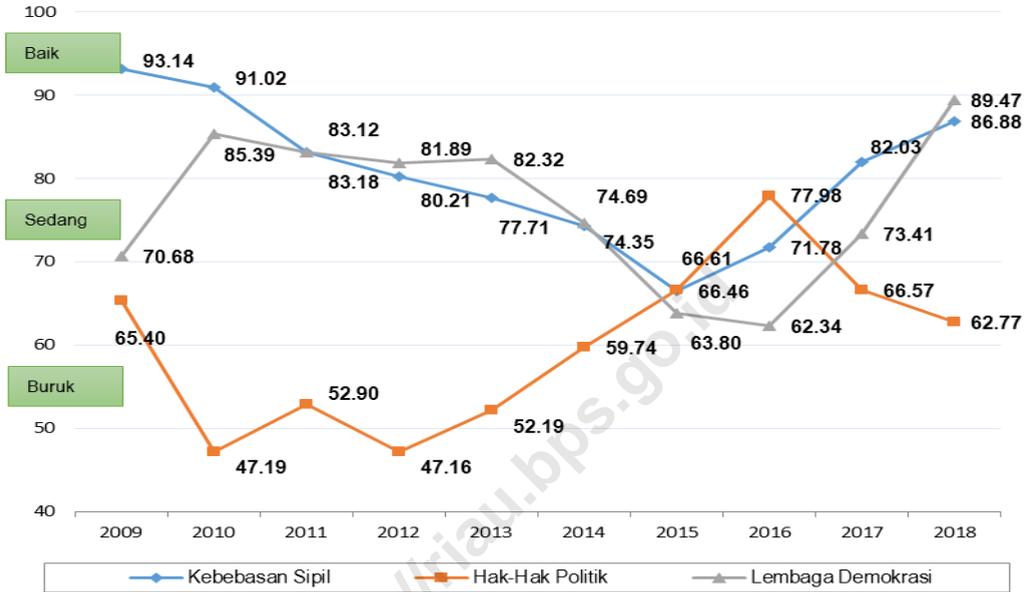
Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Provinsi Riau sebesar 75,85 kemudian angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 67,00 di tahun 2012. IDI Provinsi Riau kemudian mengalami kenaikan hingga sebesar 68,40 pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 65,83 dan tahun 2016 kembali naik sebesar 71,89 hingga terus mengalami kenaikan sebesar 77,59 di tahun 2018. Nilai IDI 2018 merupakan nilai tertinggi yang pernah diperoleh Provinsi Riau sejak tahun 2009.

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Riau. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Grafik 2.1.2 menunjukkan sebaran dan perbandingan nilai capaian Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi tahun 2009-2018. Pola sebaran capaian ketiga aspek setiap tahun tidak sama. Pada tahun 2018, Lembaga Demokrasi merupakan aspek dengan nilai capaian paling tinggi, diikuti Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik.

Grafik 2.1.2

Sebaran Nilai Capaian Aspek IDI Provinsi Riau, 2009-2018



Capaian aspek Kebebasan Sipil dari tahun 2009 hingga tahun 2015 selalu mengalami penurunan hingga mencapai pada kategori “sedang” dan sejak tahun 2016 terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 masuk pada kategori “baik”. Sedangkan Capaian aspek Lembaga Demokrasi tahun 2018 merupakan kenaikan yang paling tinggi dan kembali mencapai pada kategori “baik”. Nilai Aspek Lembaga Demokrasi Provinsi Riau tahun 2018 naik sebanyak 16,06 poin dibandingkan tahun 2017. Sementara capaian Aspek Hak-Hak Politik tahun 2018 kembali mengalami penurunan sejak tahun 2009 hingga 2018, Aspek Hak-Hak Politik belum pernah mencapai kategori “baik” hanya sampai posisi kategori “sedang”. Penurunan Aspek Hak-Hak Politik ini disebabkan oleh meningkatnya kejadian demonstrasi/mogok yang bersifat

kekerasan pada Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yang nilainya turun hingga 15,22 poin.

Kecenderungan indeks IDI, menunjukkan bahwa Aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 73,41 tahun 2017 menjadi 89,47 pada tahun 2018, dan berubah menjadi kategori "baik". Aspek Kebebasan Sipil juga mengalami kenaikan dari 82,03 tahun 2017 menjadi 86,88 pada tahun 2018 dan tetap pada kategori "baik". Hal sebaliknya terjadi pada Aspek Hak-Hak Politik menunjukkan penurunan dari 66,57 pada tahun 2017 menjadi 62,77 pada tahun 2018.

2.2 Indeks Aspek Kebebasan Sipil

Aspek Kebebasan Sipil IDI mengukur kebebasan individu dan kelompok dalam kaitannya dengan kekuasaan negara dan atau kelompok. Dengan kata lain, IDI tidak mengukur tingkat kebebasan individu atau warga negara dari individu atau warga negara lainnya.

Nilai indeks Aspek Kebebasan Sipil IDI 2018 Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 4,85 poin, dari 82,03 pada tahun 2017 menjadi 86,88 pada tahun 2018, Nilai Indeks Aspek Kebebasan Sipil tersebut berada pada posisi kategori "baik". Sejak tahun 2009 sampai dengan 2015, Aspek Kebebasan Sipil selalu menunjukkan penurunan hingga meluncur ke angka 60. Namun sejak tahun 2016, kualitas kinerja Aspek Kebebasan Sipil terus membaik hingga tahun 2018.

Nilai indeks Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2018 dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yaitu: Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat (97,66), Kebebasan Berpendapat (83,30), Kebebasan Berkeyakinan

(83,20), dan Kebebasan dari Diskriminasi (93,47). Jika dibandingkan dengan IDI 2017, terjadi penurunan nilai pada dua variabel IDI Provinsi Riau. Variabel tersebut adalah Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat dan Variabel Kebebasan Berpendapat. Sementara dua variabel lainnya yaitu Variabel Kebebasan Berkeyakinan dan Variabel Kebebasan dari Diskriminasi mengalami kenaikan.

Pada Aspek Kebebasan Sipil terdapat indikator yang mengalami penurunan dari sepuluh indikator yang membentuknya. Pertama nilai indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat berubah dari 100,00 menjadi 81,25. Kedua indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat yang juga mengalami penurunan sangat tajam dari 62,50 menjadi 0,00.

Tabel 2.2.1 menggambarkan sebaran nilai keempat variabel pada aspek Kebebasan Sipil IDI 2018 serta perbandingannya dengan IDI 2017. Hasil IDI 2018 dibandingkan dengan hasil IDI 2017. Capaian nilai indeks Aspek Kebebasan Sipil di Provinsi Riau tahun 2018 naik sebesar 4,85 poin. Kenaikan nilai indeks tersebut disumbang oleh meningkatnya nilai Variabel Kebebasan Berkeyakinan 4,24 poin dan Variabel Kebebasan dari Diskriminatif sebanyak 14,79 poin.

Adapun indikator yang mengalami penurunan tertinggi terdapat pada Variabel Kebebasan Berpendapat indikator tersebut adalah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Indikator ini mengalami penurunan sebesar 62,50 poin dibandingkan tahun 2017. Penurunan tertinggi kedua terjadi pada indikator ancaman atau penggunaan

kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, indikator tersebut mengalami penurunan sebesar 18.75 poin.

Tabel 2.2.1
Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil

VARIABEL	2017	2018
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	97,66
Kebebasan Berpendapat	93,74	83,30
Kebebasan Berkeyakinan	78,96	83,20
Kebebasan dari Diskriminasi	78,68	93,47
Aspek Kebebasan Sipil	82,03	86,88

Penjelasan berikut akan menguraikan secara lebih rinci perolehan nilai indeks setiap variabel.

2.2.1 Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Nilai indeks Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat tahun 2018 sebesar 97,66 poin jika dibandingkan tahun 2017, nilai variabel ini mengalami sedikit penurunan, ini disebabkan nilai salah satu dari dua indikator yang terdapat di dalamnya, mengalami penurunan. Indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat adalah indikator yang mengalami penurunan. Nilai indikator ini mengalami penurunan sebesar 18,75 poin dari 100,00 menjadi 81,25 pada tahun 2018.

Tabel 2.2.2
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan
Berkumpul dan Berserikat

INDIKATOR	2017	2018
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	81,25
Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	97,66

Tabel 2.2.2 memperlihatkan nilai indeks Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat di Provinsi Riau sebesar 97,66 pada tahun 2018. Nilai variabel ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017 dengan nilai sebesar 100,00. Penurunan variabel ini dipengaruhi oleh nilai indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat yang turun sebanyak 18,75 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu nilai Indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat tidak mengalami perubahan, masih tetap pada nilai 100,00.

Dibandingkan tahun 2017, nilai aspek kebebasan sipil IDI 2018 mengindikasikan perilaku masyarakat yang kurang menggunakan cara-cara berdialog dalam berkomunikasi antar sesama masyarakat. Sementara hak kebebasan warga untuk berkumpul dan berserikat tidak mengalami hambatan dari pemerintah selama tahun 2018.

2.2.2 Variabel Kebebasan Berpendapat

Nilai indeks Variabel Kebebasan Berpendapat di Provinsi Riau pada tahun 2018 adalah sebesar 83,30. Dibandingkan dengan tahun 2017, nilai variabel Kebebasan Berpendapat tahun 2018 turun hingga mengalami penurunan sebesar 10,44 poin. Hal ini menggambarkan kualitas kinerja variabel yang menurun, masih pada kategori “baik” di tahun 2018.

Penurunan nilai Variabel Kebebasan Berpendapat disebabkan nilai indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 62,50 poin dibandingkan tahun 2017. Nilai indikator tersebut pada tahun 2017 sebesar 62,50 berubah menjadi sebesar 0,00 pada tahun 2018. Sementara skor indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat tahun 2018 masih tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 100,00. Nilai kedua indikator tersebut menyebabkan Variabel Kebebasan Berpendapat mengalami perubahan pada tahun 2018 seperti dapat dilihat pada Tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.3
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berpendapat

INDIKATOR	2017	2018
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	62,50	00,00
Variabel Kebebasan Berpendapat	93,74	83,30

Penurunan nilai variabel Kebebasan Berpendapat tersebut mengindikasikan kebebasan berpendapat masyarakat semakin dibatasi oleh masyarakat lainnya telah terjadi di Provinsi Riau selama tahun 2018.

2.2.3 Variabel Kebebasan Berkeyakinan

Nilai indeks Variabel Kebebasan Berkeyakinan di Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 4,24 poin, dari 78,96 pada tahun 2017 menjadi 83,20 pada tahun 2018. Variabel ini dibentuk dari tiga indikator. pada Tabel 2.2.4, dapat dilihat terjadi peningkatan pada salah satu indikator, sedangkan pada dua indikator lainnya tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.2.4
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berkeyakinan

INDIKATOR	2017	2018
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya	78,26	78,26
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	50,00	87,50
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00	100,00
Variabel Kebebasan Berkeyakinan	78,96	83,20

2.2.4 Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

Dibandingkan tahun 2017, nilai indeks variabel Kebebasan dari Diskriminasi di Provinsi Riau pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan (lihat Tabel 2.2.5). Nilai variabel tersebut dipengaruhi oleh dua dari tiga indikator yang di dalamnya.

Pertama, indikator tentang aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya yang nilainya pada tahun 2018 naik sebesar 16,57 poin dibandingkan dengan nilai tahun 2017. Kedua, indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya mengalami kenaikan sebesar 25 poin dari nilai 75,00 pada tahun 2017 menjadi 100,00 pada tahun 2018. Sementara itu, nilai indikator tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya masih tetap sebesar 100,00.

Tabel 2.2.5
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan dari
Diskriminasi

INDIKATOR	2017	2018
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	66,76	83,33
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	75,00	100,00
Variabel Kebebasan dari Diskriminasi	78,68	93,47

2.3 Indeks Aspek Hak-Hak Politik

Indeks aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau sejak tahun 2013 selalu mengalami peningkatan nilai hingga mencapai nilai 77,98 pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 66,57 atau turun sebesar 11,41 poin. Nilai ini terus menurun di tahun 2018 sebesar 3,80 poin atau nilainya menjadi sebesar 62,77. Meskipun mengalami penurunan, nilai indeks ini di tahun 2018 masih dalam kategori “sedang”. Penurunan ini disebabkan nilai Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan mengalami penurunan sebesar 7,61 poin, menjadi 50,00 pada tahun 2018 hal ini terjadi akibat kejadian demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan pada tahun 2018 di Provinsi Riau semakin meningkat.

Nilai Aspek Hak-hak Politik sebesar 62,77 menggambarkan kualitas pemenuhan hak-hak politik di Riau masih cukup memprihatinkan. Indeks Hak-Hak Politik yang cukup rendah secara umum menyiratkan kemungkinan

adanya stagnasi dalam pemenuhan hak-hak politik. Nilai indeks Aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau tahun 2018 merupakan angka yang paling rendah dibandingkan dua aspek IDI lainnya. Artinya pemenuhan akan hak-hak politik masyarakat Riau perlu lebih diperhatikan lagi karena dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu mengalami penurunan.

Menurunnya nilai indeks Aspek Hak-Hak Politik pada tahun 2018 tersebut disebabkan oleh nilai Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan mengalami penurunan sebanyak 7,61 poin dari tahun 2017 menjadi sebesar 50,00. Sedangkan nilai Variabel Hak Memilih dan Dipilih masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 75,53 (lihat Tabel 2.3.1).

Tabel 2.3.1
Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik

VARIABEL	2017	2018
Hak Memilih dan Dipilih	75,53	75,53
Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	57,61	50,00
Aspek Hak-Hak Politik	66,57	62,77

Aspek Hak-Hak Politik terdapat dua Variabel yakni Hak Memilih dan Dipilih yang terdiri dari lima indikator dan Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yang terdiri dari dua indikator.

2.3.1 Variabel Hak Memilih dan Dipilih

Nilai indeks Variabel Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Riau pada tahun 2018 tidak mengalami penurunan atau kenaikan dibanding nilai indeks pada tahun (lihat Tabel 2.3.2).

Tabel 2.3.2
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Hak Memilih dan Dipilih

INDIKATOR	2017	2018
Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat	97,44	97,44
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	60,00
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	68,82	68,82
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>)	69,48	69,48
Persentase anggota perempuan DPRD Provinsi terhadap total anggota DPRD Provinsi	92,31	92,31
Variabel Hak Memilih dan Dipilih	75,53	75,53

Empat dari lima indikator dalam Variabel Hak Memilih dan Dipilih yaitu indikator pertama sampai dengan indikator keempat terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), karena data yang digunakan diperoleh pada tahun penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu seperti tahun 2009, data dari empat indikator tersebut merupakan data dari pemilu pada tahun 2014 (perkembangannya lihat Grafik 2.3.1).

Indikator pertama adalah Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat dengan skor 97,44 pada tahun 2014, meningkat 3,21 poin dari nilai tahun 2009 yaitu sebesar 94,23. Artinya kejadian yang menghambat hak memilih dan dipilih masyarakat semakin berkurang.

Indikator kedua adalah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih dengan skor 60,00 pada tahun 2014, meningkat 10 poin dari skor tahun 2009 yaitu 50,00. Artinya, pemerintah semakin memfasilitasi kelompok penyandang cacat agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya.

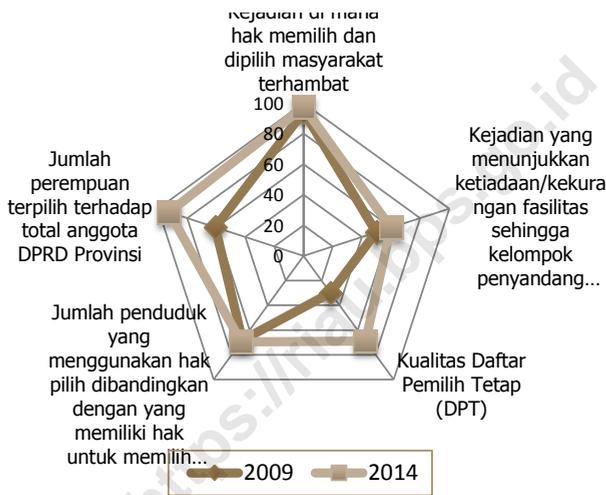
Indikator ketiga adalah kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan skor 68,82 pada tahun 2014, meningkat 38,82 poin dari skor tahun 2009 yaitu 30,00. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas DPT di Provinsi Riau berada pada kategori "sedang", namun kualitas DPT Tahun 2014 sudah lebih baik dari kualitas DPT tahun 2009. Peningkatan kualitas DPT tahun 2014 membuat penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik.

Indikator keempat adalah persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*) dengan skor 69,48 pada tahun 2014, meningkat 1,37 poin dari skor tahun 2009 yaitu 68,11. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat Riau untuk menggunakan hak pilihnya sudah semakin meningkat.

Sedangkan Indikator kelima, yakni persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi dengan skor 92,31 pada tahun 2018, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2017. Indikator ini merupakan indikator yang pengumpulan datanya dilakukan setiap tahun, tidak terkait dengan tahun penyelenggaraan pemilu. Data dikumpulkan dengan

mencatat jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Riau pada tahun 2018.

Grafik 2.3.1
Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel Hak Memilih dan Dipilih yang
Terkait Pemilihan Umum, Tahun 2009 dan 2014



2.3.2 Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Nilai indeks Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan pada tahun 2018 yaitu sebesar 50,00, mengalami penurunan sebesar 7,61 poin dibandingkan dengan tahun 2017 yang nilainya 57,61 (lihat Tabel 2.3.3). Nilai variabel tersebut dipengaruhi oleh menurunnya nilai salah satu indikator yang terdapat di dalamnya, sedangkan indikator lainnya masih pada posisi yang sama seperti pada tahun 2017.

Dari Tabel 2.3.3 terlihat bahwa penyebab menurunnya nilai indeks untuk Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan adalah turunnya nilai indikator demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan sebesar 15,22 poin, dimana nilainya pada tahun 2017 adalah 15,22 dan pada tahun 2018 nilainya menjadi 0,00. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya kejadian demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan atau mengarah pada tindak kekerasan di Provinsi Riau selama tahun 2018.

Tabel 2.3.3

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

INDIKATOR	2017	2018
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	15,22	0,00
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00
Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	57,61	50,00

2.4 Indeks Aspek Lembaga Demokrasi

Indeks Lembaga Demokrasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari sebesar 16,06 poin dari 73,41 pada tahun 2017 menjadi 89,47 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan capaian indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2018 termasuk pada kategori “baik”.

Peningkatan nilai indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2018, antara lain dapat dijelaskan berdasarkan kontribusi dari nilai indeks masing-masing variabel dan juga indikator pada aspek yang bersangkutan. Secara khusus, bila dicermati distribusi nilai indeks lima variabel pada aspek Lembaga Demokrasi yaitu: Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah, dan Peran Peradilan Independen, terlihat dengan jelas bahwa terdapat tiga variabel yang telah memberikan kontribusi terhadap kenaikan capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2018 variabel tersebut adalah Peran DPRD yang naik sebesar 10,30 poin dari 77,06 pada tahun 2017 menjadi 87,36 pada tahun 2018, kemudian Peran Birokrasi Pemerintah naik sebesar 11,80 poin, yaitu dari 58,70 pada tahun 2017 menjadi 70,50 pada tahun 2018, dan selanjutnya indeks Variabel Peran Peradilan yang Independen naik sebesar 50,00 poin, yaitu dari nilai 50,00 pada tahun 2017 menjadi nilai 100,00 pada tahun 2018. Sementara itu dua variabel lainnya masih memiliki nilai yang sama seperti tahun 2017 yakni pada Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, dan Variabel Peran Partai politik dengan nilai sebesar 100.00. Nilai indeks masing-masing variabel Aspek Lembaga Demokrasi dapat dilihat pada Tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1**Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi**

VARIABEL	2017	2018
Pemilu yang Bebas dan Adil	91,14	91,14
Peran DPRD	77,06	87,36
Peran Partai Politik	100,00	100,00
Peran Birokrasi Pemerintah	58,70	70,50
Peran Peradilan yang Independen	50,00	100,00
Aspek Lembaga Demokrasi	73,41	89,47

Merujuk pada Tabel 2.4.1, sedikitnya ada dua poin penting yang menarik untuk digarisbawahi terkait dengan konfigurasi angka-angka indeks variabel pada aspek Lembaga Demokrasi.

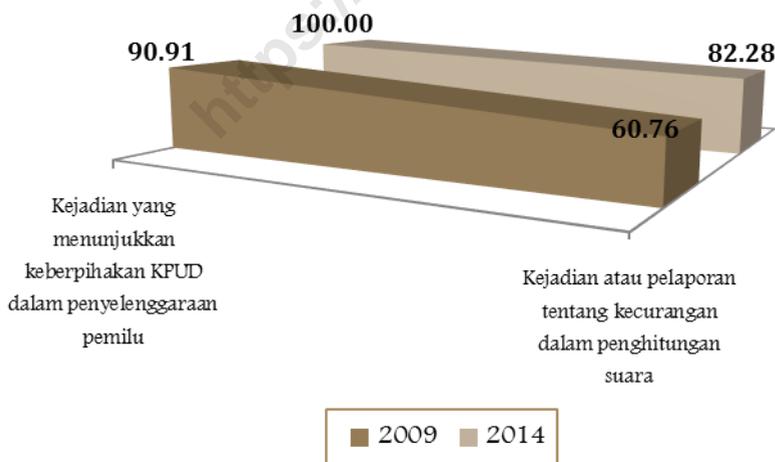
Pertama, pada tahun 2017 Aspek Lembaga Demokrasi masih pada kategori "sedang" namun pada tahun 2018 aspek Lembaga Demokrasi sudah mendekati ke angka 90 dan masuk pada kategori "baik". Hal ini disebabkan terjadi kenaikan nilai pada tiga variabel yakni Variabel Peran DPRD, Peran Birokrasi Pemerintah, dan Peradilan yang Independen.

Kedua, dari tiga variabel yang menunjukkan peningkatan tersebut ada satu variabel yang mengalami kenaikan sangat signifikan yaitu Variabel Peran Peradilan yang Independen. Variabel tersebut naik sebesar 50,00 poin yang sebelumnya berada pada kategori "buruk" namun pada tahun 2018 sudah masuk kategori "baik".

2.4.1 Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil

Nilai indeks dari Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil di Provinsi Riau pada tahun 2018 adalah 91,14. Nilai ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2017. Hal ini dikarenakan variabel ini terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), karena data yang digunakan hanya dapat diperoleh pada tahun penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, variabel ini hanya dikumpulkan pada tahun 2009 dan 2014 dengan demikian nilai variabel pemilu yang bebas dan adil 2018 akan sama dengan tahun 2014. Perkembangan nilai indikator Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil yang terkait pemilihan umum tahun 2009 dan 2014 dapat dilihat pada Grafik 2.4.1.

Grafik 2.4.1
Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil yang Terkait Pemilihan Umum, Tahun 2009 dan 2014



Tabel 2.4.2
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam
Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil

INDIKATOR	2017	2018
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	82,28	82,28
Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil	91,14	91,14

2.4.2 Variabel Peran DPRD

Nilai indeks Variabel Peran DPRD di Provinsi Riau tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyebab meningkatnya nilai indeks Variabel Peran DPRD pada tahun 2018 dapat terlihat dari capaian nilai tiga indikator, didalamnya yang semuanya mengalami kenaikan (Tabel 2.4.3).

Dibandingkan dengan tahun 2017, Indikator yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan mengalami kenaikan sebesar 38,00 poin. Sedangkan kenaikan yang terendah sebesar 3,57 poin terjadi pada indikator rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Tabel 2.4.3**Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran DPRD**

INDIKATOR	2017	2018
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD	86,05	91,68
Persentase Jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	50,00	88,00
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	67,86	71,43
Variabel Peran DPRD	77,06	87,36

2.4.3 Variabel Peran Partai Politik

Nilai indeks Variabel Peran Partai Politik di Provinsi Riau dari tahun 2017 hingga tahun 2018 masih berada pada angka 100,00. (lihat Tabel 2.4.4). kedua indikator inilah yang mempengaruhi nilai indeks Variabel Peran Partai Politik sehingga masih berada pada kategori “baik”.

Tabel 2.4.4**Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Partai Politik**

INDIKATOR	2017	2018
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100,00	100,00
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100,00	100,00
Variabel Peran Partai Politik	100,00	100,00

Capaian kinerja Variabel Peran Partai Politik pada tahun 2018 masih pada kategori “baik”. Demikian juga capaian kinerja untuk dua indikator yang mempengaruhi Variabel Peran Partai Politik yang juga masih pada kategori “baik” Kedua indikator tersebut adalah kegiatan kaderisasi yang Dilakukan parpol Peserta Pemilu dan Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Parpol Tingkat Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa peran partai politik pada tahun 2018 sudah mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan pendidikan demokrasi bagi masyarakat di Provinsi Riau.

2.4.4 Variabel Peran Birokrasi Pemerintah

Nilai indeks dari Variabel Peran Birokrasi Pemerintah di Provinsi Riau pada tahun 2018 adalah sebesar 70,50 naik sebesar 11,80 poin jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 58,70. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 2.4.5.

Tabel 2.4.5
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Birokrasi Pemerintah

INDIKATOR	2017	2018
Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	78,95	55,26
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	41,66	83,33
Variabel Peran Birokrasi Pemerintah	58,70	70,50

Salah satu indikator yang menyumbang naiknya nilai indeks Variabel Peran Birokrasi Pemerintah pada tahun 2018 yaitu indikator upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah yang mengalami kenaikan sebesar 41,67 poin jika dibandingkan pada tahun 2017. Semula indikator tersebut sebesar 41,66 menjadi 83,33 pada tahun 2018. Sedangkan indikator jumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN mengalami penurunan sebesar 23,69 poin pada tahun 2018.

2.4.5 Variabel Peran Peradilan yang Independen

Nilai indeks dari Variabel Peran Peradilan yang Independen di Provinsi Riau pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun 2017. Nilai indeks variabel ini pada tahun 2018 adalah sebesar 100,00, sedangkan pada tahun 2017 adalah sebesar 50,00. Kenaikan nilai indeks ini menyebabkan Variabel Peran Peradilan yang Independen berubah kategori dari level “buruk” menjadi level “baik”.

Tabel 2.4.6
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Peradilan yang Independen

INDIKATOR	2017	2018
Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	0,00	100,00
Variabel Peran Peradilan yang Independen	50,00	100,00

Pada tahun 2018, indikator keputusan hakim yang kontroversial Masih tetap sama nilainya dibandingkan tahun 2017 yaitu pada angka 100,00. Sedangkan indikator penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 100,00 jika dibandingkan tahun 2017. Nilai indikator tersebut berubah dari 0,00 menjadi 100,00. Hal ini menyebabkan nilai indeks Variabel Peran Peradilan yang Independen berubah dari kategori "buruk" menjadi "baik".

<https://riau.bps.go.id>

3

KESIMPULAN

IDI PROVINSI RIAU 2018 : 77,59

Aspek Kebebasan Sipil
86,88

Variabel I : 97,66

Indikator 1 : 100,00

Indikator 2 : 81,25

Variabel II : 83,30

Indikator 3 : 100,00

Indikator 4 : 0,00

Variabel III : 83,20

Indikator 5 : 78,26

Indikator 6 : 87,50

Indikator 7 : 100,00

Variabel IV : 93,47

Indikator 8 : 83,33

Indikator 9 : 100,00

Indikator 10 : 100,00

Variabel V : 75,53

Indikator 11 : 97,44

Indikator 12 : 60,00

Indikator 13 : 68,82

Indikator 14 : 69,48

Indikator 15 : 92,31

Variabel VI : 50,00

Indikator 16 : 0,00

Indikator 17 : 100,00

Variabel VII : 91,14

Indikator 18 : 100,00

Indikator 19 : 82,28

Variabel VIII : 87,36

Indikator 20 : 91,68

Indikator 21 : 88,00

Indikator 22 : 71,43

Variabel IX : 100,00

Indikator 23 : 100,00

Indikator 24 : 100,00

Variabel X : 70,50

Indikator 25 : 55,26

Indikator 26 : 83,33

Variabel XI : 100,00

Indikator 27 : 100,00

Indikator 28 : 100,00

Aspek Hak-Hak Politik
62,77

Aspek Lembaga Demokrasi
89,47

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau 2018 mencapai angka 77,59 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan 4,18 poin dibandingkan dengan IDI 2017 yang sebesar 73,41. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”.

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau dari tahun 2017 ke tahun 2018 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang naik 4,85 poin (dari 82,03 menjadi 86,88), (2) Hak-Hak Politik yang turun 3,80 poin (dari 66,57 menjadi 62,77), sedangkan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi naik 16,06 poin (dari 73,41 menjadi 89,47).

Pada tahun 2018, aspek Kebebasan Sipil mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 sebesar 4,85 poin. Sementara itu, aspek Hak-Hak Politik mengalami penurunan sebesar 3,80 poin dan diiringi peningkatan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 16,06. Kenaikan nilai pada aspek Kebebasan Sipil dan aspek Lembaga Demokrasi tentunya mendukung peningkatan IDI Provinsi Riau di tahun 2018. Aspek Hak Politik berada dalam kategori “sedang” (skor 60- 80) sedangkan aspek Kebebasan Sipil dan aspek Lembaga Demokrasi sudah berada dalam kategori “baik” (skor > 80).

Dari 11 variabel IDI terdapat 5 variabel yang mengalami kenaikan indeks, 3 variabel yang mengalami penurunan dan 3 variabel tidak mengalami perubahan. Lima variabel yang mengalami kenaikan antara lain : Kebebasan Berkeyakinan, Kebebasan dari Diskriminasi, Peran DPRD, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, dan Peran Peradilan yang Independen. Variabel yang mengalami penurunan antara lain: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,

Kebebasan Berpendapat, dan Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Variabel yang tidak mengalami perubahan antara lain: Hak Memilih dan Dipilih, Pemilu yang Bebas dan Adil, dan Peran Partai Politik.

Variabel Peran Peradilan yang Independen mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 50,00 poin, dari 50,00 pada 2017 menjadi 100,00 pada 2018. Hal ini disebabkan tidak adanya keputusan hakim yang kontroversial serta penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi selama tahun 2018.

Kenaikan tertinggi kedua terjadi pada Variabel Kebebasan dari Diskriminasi yang naik 14,79 poin, dari 78,68 pada tahun 2017 menjadi 93,47 pada tahun 2018. Kenaikan ini dapat dipantau selama tahun 2018 dengan semakin berkurangnya aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya serta tidak adanya pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif atau pun ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Selanjutnya kenaikan tertinggi ketiga sebesar 11,80 poin terjadi pada Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 58,70 pada tahun 2017 menjadi 70,50 pada tahun 2018. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah pada tahun 2018.

Di sisi lain, Variabel Kebebasan Berpendapat mengalami penurunan sebesar 10,44 poin, dari 93,74 pada tahun 2017 menjadi 83,30 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan di Provinsi Riau selama tahun 2018 masih terdapat kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 7,61 poin, dari 57,61 pada tahun 2017 menjadi 50,00 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan dari makin banyaknya demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan selama tahun 2018. Terlihat bahwa variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan di Provinsi Riau perlu untuk lebih ditingkatkan karena masih berada dalam kategori “buruk” (skor <60).

<https://riau.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2014. *Indeks Demokrasi Indonesia: Pedoman Teknis Tata Cara Pengumpulan Data*. Jakarta: BPS.

_____. 2015. *Indeks Demokrasi Indonesia: Petunjuk Teknis Tata Cara Pengumpulan Data*. Jakarta: BPS.

_____. 2013. *Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2014. *Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

_____. 2016. *Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2012 – 2015*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

_____. 2017. *Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2015 – 2016*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2019. *Berita Resmi Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau Tahun 2018*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau

<https://riau.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau**
Jl. Pattimura No.12 Pekanbaru, 28131
Telp. (0761) 23042, Fax. (0761) 21336
Homepage://riau.bps.go.id, Email: bps1400@bps.go.id

